

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Sudikno Mertokusumo, 2009: 212). Putusan dapat ditinjau dari berbagai aspek, yang pertama ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, yang kedua ditinjau dari sifatnya, dan yang ketiga ditinjau pada saat penjatuhannya.

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatukan oleh hakim terhadap perkara tanpa hadirnya tergugat atau termohon. Dalam pasal 125 HIR, “apabila pada hari sidang yang ditentukan tergugat tidak hadir, tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap persidangan meskipun dia telah dipanggil dengan patut maka pada saat itu juga hakim dapat menjatuhkan putusan dengan verstek atau tanpa hadirnya tergugat”. Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan (Yahya Harahap, 2007: 383).

Ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama, dapat langsung memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan secara verstek. Namun, hal ini dianggap kurang layak sehingga hakim dapat mengundurkan sidang dan

memanggil tergugat sekali lagi. Jika pada sidang kedua tergugat tidak hadir, maka pada saat itu hakim akan menjatuhkan putusan dengan verstek.

Masalah lain verstek dalam perkara perceraian, adalah permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Materiil dan Hukum Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil (Subekti, 1982: 127). Berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Hukum Acara Berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat khusus dalam Undang-undang tersebut

Mengenai permasalahan pembuktian dalam perkara verstek, ada beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengacu kepada pembuktian dalam perkara perdata, bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah tidak perlu pembuktian sehingga mengenai pembuktian dalam verstek itu tidak diperlukan, selama tidak ada bantahan terhadap dalil gugatan serta apakah tuntutan itu melawan hak atau tiada berasal cukup dilihat dari gugatan yang ada. Pendapat kedua mengatakan bahwa meskipun suatu gugatan itu tidak dibantah, akan tetapi untuk “membuktikan” bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak harus dibuktikan oleh penggugat dengan bukti-bukti yang ada (Sektiekaguntoro, 2014) .

Terhadap perkara perceraian hakim harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan hukum acara agar tidak merugikan pencari keadilan, sehingga hakim harus tetap melewati proses pembuktian, walaupun terhadap perkara verstek. Pembuktian dalam perkara verstek diajukan oleh penggugat. Penggugat dapat mengajukan alat bukti surat berupa buku nikah, serta beberapa saksi dari orang yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan rumah tangganya.

Saksi yang diajukan harus benar-benar mengetahui mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Saksi yang harus diajukan oleh penggugat adalah minimal 2 orang, hal ini berdasarkan firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282:

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
... وَاسْتَشْهَدُوا

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ ...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2010: 48)

Menurut Sudikno Mertokusumo (2009: 169), “keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian”.

Kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok peristiwa yang disengketakan disebut

sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain (Yahya Harahap, 2007: 661). Kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti langsung dalam persidangan, karena dianggap kesaksiannya itu meragukan dan tidak dapat dipercaya. *Testimonium de auditu* dapat dijadikan suatu alat bukti sebagai pelengkap dari alat bukti yang lainnya.

Dalam Hukum Acara di lingkungan peradilan umum, dikenal istilah *Unus Testum Nullus Testum*, artinya “satu saksi sama dengan bukan kesaksian”, maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat langsung memutus. Ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai menggantikannya (Roihan A. Rasyid, 2010: 172).

Asas *Unus Testis Nullus Testis*, erat kaitannya dengan *testimonium de auditu*. Karena apabila seorang Penggugat atau Tergugat dalam pembuktiannya mengajukan dua orang saksi yang kemudian salah satu saksinya itu *testimonium de auditu*, maka pembuktiannya itu tidak dapat diterima karena *Unus Testis Nullus Testis*.

Putusan No. 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk merupakan salah satu putusan yang dijatuhkan secara verstek di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pada proses pembuktian, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya. Akan tetapi satu orang saksi dianggap memberikan kesaksian *testimonium de auditu* yang merupakan kesaksian yang bersifat desas-desus atau

tidak berdasarkan penglihatan, pendengaran, ataupun pengalaman saksi. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan satu orang saksi saja tanpa ada alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, atau disebut juga *Unus Testis Nullus Testis* dan pembuktian ini juga tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang sempurna. Sehingga Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan, bahwa *Unus Testis Nullus Testis* tidak dapat dipercaya oleh hukum karena tidak ada bukti lain yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat menguatkan dalil gugatannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *Unus Testis Nullus Testis* dalam suatu putusan yang dijatuhkan secara verstek dengan judul **“PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM PUTUSAN VERSTEK NOMOR 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk TENTANG CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA”**.

Pada dasarnya, putusan verstek tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tahun 2014 hakim memutus dengan saksi yang sempurna yaitu dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Seperti pada putusan Nomor 0910/Pdt.G/2014/PA.Tmk, Nomor 1154/Pdt.G/2014/PA.Tmk, Nomor 1477/Pdt.G/2014/PA.Tmk, Nomor 1309/Pdt.G/2014/PA.Tmk, dan Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA.Tmk, putusan-putusan tersebut memiliki saksi yang

sempurna sehingga Majelis Hakim pada putusannya tidak perlu menerapkan asas *Unus Testis Nullus Testis*.

Tetapi pada putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk, hakim memandang bahwa salah satu saksi yang diajukan tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat materiil dengan keterangan yang diberikan saksi tidak berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Untuk itu, hakim berpendapat bahwa pada putusan ini saksi yang dapat dijadikan alat bukti sempurna oleh penggugat hanya satu saksi sehingga perlu diterapkan asas *Unus Testis Nullus Testis* yakni satu saksi bukan saksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 169 HIR bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum.

B. Rumusan Masalah

Dalam pemeriksaan perkara verstek, hakim tetap melakukan pembuktian sebagai bentuk kehati-hatian dalam memutus suatu perkara. Pembuktian dengan 2 orang saksi dilakukan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat. Namun dalam putusan No. 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk, salah satu saksi yang diajukan tidak mengetahui secara persis keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat atau disebut juga "*Unus Testis Nullus Testis*" yaitu, satu saksi bukan saksi.

Dari pernyataan diatas, diajukan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana proses pemeriksaan saksi *Unus Testis Nullus Testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk?

2. Bagaimana Majelis Hakim memberikan tahapan pemeriksaan terhadap saksi *Unus Testis Nullus Testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi *Unus Testis Nullus Testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk.
3. Untuk mengetahui tahapan pemeriksaan terhadap saksi *Unus Testis Nullus Testis* dalam putusan verstek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk?

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah guna pengkajian lebih lanjut dan mendalam yang berhubungan dengan penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam suatu putusan verstek yang digunakan oleh hakim.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktisi hukum di lembaga Pengadilan Agama, masyarakat umum, dan penulis lain, serta diharapkan dapat menambah wawasan agar para pembaca lebih memahami dalam hal penerapan Asas *Unus Testis Nullus Testis* dalam suatu putusan verstek, baik secara teoritis maupun praktis.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan adalah putusan. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk

tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*) (Mukti Arto, 1996: 251).

Tahapan pemeriksaan perkara dilakukan dari sidang pertama sampai suatu putusan dibacakan. Tahap sidang pertama terdiri dari: (1) hakim membuka sidang, (2) hakim menanya identitas pihak-pihak (3) pembacaan surat gugatan atau permohonan, dan (4) anjuran damai. Anjuran damai pada tahap ini adalah wajib serta mutlak perlu dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, terlepas daripada tercapai perdamaian atau tidaknya (Roihan A. Rasyid, 2010: 135).

Pada sidang pertama ini, ada hal-hal penting yang mungkin terjadi dan sangat berpengaruh terhadap proses perkara, salah satunya ialah tergugat/termohon tidak hadir tanpa alasan (Roihan A. Rasyid, 2010: 135).

Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap maka perkaranya akan diputus dengan verstek, yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah (Roihan A. Rasyid, 2010: 105).

Dalam putusan verstek, maka tuntutan dapat dikabulkan, apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak. Tetapi jika gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan verstek berupa pernyataan hakim bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Mukti Arto, 1996: 87).

Jika gugatan *tidak bersandarkan hukum*, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Jika gugatan itu *tidak beralasan*, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara,

sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara (Sudikno Mertokusumo, 2009: 110).

Putusan verstek dijatuhkan tanpa membuktikan lebih dahulu dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat karena tidak dibantah oleh tergugat, kecuali dalam hal perkara perceraian. Menurut pendapat Mahkamah Agung yang terbaru, maka khusus dalam perkara perceraian, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil gugat (alasan-alasan perceraian) telah dibuktikan dalam persidangan (Mukti Arto, 1996:87).

Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan (Roihan A. Rasyid, 2010: 144). Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Mukti Arto, 1996: 140).

Adapun yang menjadi hukum pembuktian dalam hukum acara perdata ini terfokus pada pasal 163 HIR/283 R.Bg, yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan tidak adanya penggugat, tetapi tergugat terkadang juga harus membuktikan adanya kejadian itu”(M. Fauzan, 2005: 35).

Alat pembuktian adalah *bahan yang dipakai untuk pembuktian dalam suatu perkara*. Dalam pasal 103 disebutkan bahan-bahan itu: tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah (Mr. A. Pitlo, 1986: 26). Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1866 KUH Perdata adalah alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah (Roihan A. Rasyid, 2010: 151).

Dalam hal pembuktian dengan saksi, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 171 ayat 2 HIR (ps. 308 ayat 2 R.Bg, 1907 BW) (Sudikno Mertokusumo, 2009: 169).

Senada dengan hal ini juga disebutkan dalam Pasal 1907 KUH Perdata, yang berbunyi : “Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukan kesaksian” (Subekti dan Tjiro Sudibio, 2001: 482). Kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok peristiwa yang disengketakan disebut sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain (Yahya Harahap, 2007: 661).

Al-Quran, Surat Al-Baqarah (2): 282:

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
... وَاسْتَشْهَدُوا
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ ...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2010: 48)

Dalam ayat diatas, dijelaskan bahwa pada dasarnya saksi itu secara umum terdiri dari dua orang lelaki atau seorang lelaki bersama dua orang perempuan, yang semuanya beragama Islam (Roihan A. Rasyid, 2010: 159).

Keterangan satu orang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup: seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* (ps. 169 HIR, 309 Rbg, 1905 BW). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saja tidak boleh dianggap sebagai *sempurna* oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 2009: 172-173).

Keterangan saksi adalah alat pembuktian yang tidak dapat dipercaya. Hal tidak dapat dipercaya ini tidak selalu disebabkan oleh karena: dengan sengaja berbicara dengan tidak benar. Ingatan acap kali tidak mencukupi. Dan dalam keadaan penuh emosi berkuranglah kesanggupan untuk mengamati. Oleh karena itu undang-undang membebaskan hakim bergerak ke jurusan positif: memberikan nilai kepada pembuktian saksi. Secara negatif, hakim dibatasi. Keterangan satu orang saksi tidak dapat dipercaya. Jadi hakim dilarang memberikan sesuatu arti

kepada keterangan satu orang saksi. Satu saksi, bukan saksi, demikianlah bunyi aturannya secara ringkas (Mr. A. Pitlo, 1986: 108).

Istilah *Unus Testum Nullus Testum* (latin) dijumpai dalam doktrin Hukum Acara di lingkungan Peradilan Umum, artinya “satu saksi sama dengan bukan kesaksian”, maksudnya kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat langsung memutus. Ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai menggantikannya (Roihan A. Rasyid, 2010: 172).

Tentang kekuatan pembuktian dari saksi hanya satu, bahwa kesaksian seorang saksi adalah tidak cukup untuk membuktikan hal sesuatu. Ini tidak berarti, bahwa tiap peristiwa harus dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan apabila tidak ada alat bukti lain, maka seorang saksi saja tidak cukup untuk menganggap terbukti hal sesuatu (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 114).

Pengertian dan penerapan *unus testis nullus testis* tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Artinya, tidak boleh hanya diartikan pada kasus yang bilangan saksi yang diajukan hanya seorang saja tetapi meliputi pengertian kualitas saksi yang diajukan. Meskipun saksi yang diajukan secara kuantitas jumlahnya lebih dari satu orang, kemungkinan yang memenuhi syarat formil dan materil hanya satu orang saja. Maka dalam kasus yang demikian keterangan yang diberikannya tidak sah sebagai alat bukti, karena keberadaan saksi itu tidak memenuhi persyaratan materiil yang digariskan Pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUH Perdata, sebab keberadaannya bersifat *unus testis nullus testis* (Yahya Harahap, 2007: 648-649).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen (Cik Hasan Bisri, 2001: 60). Adapun objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya perkara Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah dokumen resmi berupa putusan, yakni Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA.Tmk. serta keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yaitu H. M. Jazuli, S.Ag., MH.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen resmi, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data tentang proses pemeriksaan saksi *Unus Testis Nullus Testis* dalam putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA/Tmk.

2. Data tentang tahapan yang diberikan oleh hakim terhadap pemeriksaan saksi *Unus Testis Nullus Testis* dalam putusan vertsek Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA/Tmk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen (Suharsimi Arikunto, 2010: 274). Dokumen-dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini adalah berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan saksi *Unus Testis Nullus Testis* dan putusan verstek.
- b. Wawancara terhadap informan, yakni seorang hakim di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yaitu H. M. Jazuli, S.Ag., MH. dengan cara menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Studi pustaka dari berbagai buku, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data dari lapangan, literatur, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dari membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Menyeleksi data lalu kemudian mengumpulkan.
- b. Menafsirkan data.
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.

